

KURIKULUM MERDEKA, PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Faishal
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
stailsby@gmail.com

Abstrak

Perubahan kurikulum merupakan suatu keniscayaan dan memang harus senantiasa dilakukan perubahan dan pengembangan, karena kehidupan sosial dan budaya senantiasa terus berubah dan berkembang, sehingga menuntut adanya perubahan dan pengembangan juga atas kurikulum yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Menyikapi situasi dan kondisi pendidikan selama pandemi Covid-19, pemerintah melalui kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat kebijakan tentang penerapan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum merdeka, sehingga melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga disebut studi pustaka ini, penulis mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah dari berbagai sumber, sumber data utama adalah dari buku dan jurnal yang membahas tentang kurikulum merdeka serta didukung oleh pengalaman pribadi penulis di lapangan dalam mengimplemetasikan kurikulum merdeka guna memberikan gambaran secara objektif tentang peluang dan tantangan bagi lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Keywords: Pengembangan Kurikulum, Kurikulum Merdeka

A. PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur kepada Allah swt, bahwa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, seiring dengan banyaknya masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin beserta booster. Semoga kedepan semua sektor kehidupan sosial kemasyarakatan segera pulih dan semakin membaik.

Seiring dengan merebaknya Pandemi Covid-19 sekaligus menyikapi dan beradaptasi dengan pandemi Covid-19 ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga melaunching kurikulum baru yang dikenal dengan istilah kurikulum Prototipe atau kurikulum merdeka, sebagai upaya untuk menanggulangi krisis pembelajaran yang dilakukan secara daring selama pandemi berlangsung.

Ada tiga pilihan dalam pemulihan pembelajaran yang ditawarkan oleh menteri Pendidikan,¹ yaitu pilihan pertama; dengan melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh, atau pilihan kedua, yaitu menerapkan kurikulum darurat dengan cara menyederhanakan kurikulum 2013 yang selama ini sudah dilaksanakan, atau pilihan ketiga: dengan menerapkan kurikulum merdeka secara penuh. Sehingga kehadiran kurikulum Merdeka bukan sebagai pengganti Kurikulum 2013. Justru, Kurikulum Merdeka ini bersifat melanjutkan dan memperkuat penerapan Kurikulum 2013 dan juga kurikulum-kurikulum terdahulu.

Sejak tahun ajaran 2021/2022, Kurikulum Merdeka diuji coba secara terbatas di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru.

Mulai tahun ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dengan tiga pilihan kurikulum:

1. Mandiri Belajar - menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan (Kurikulum 2013 ditambah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)
2. Mandiri Berubah - menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pusat
3. Mandiri Berbagi - menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar

Apabila memilih Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi, Dapodik akan berubah mengikuti Kurikulum Merdeka, sedangkan pilihan Mandiri Belajar masih menggunakan Dapodik Kurikulum 2013. Pada tahun 2024 diharapkan semua PKBM/SKB akan menerapkan 1 kurikulum nasional.

Sejak diluncurkan sudah banyak sekolah yang mendaftarkan diri untuk dijadikan tempat implementasi kurikulum merdeka, walaupun masih banyak juga yang belum merespon kebijakan tersebut. Akan tetapi pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelatihan baik pengelola maupun guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.²

¹ Yogi Anggraeni, *Regulasi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka*, <https://www.yukdaring.my.id/2022>

² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, *Kebijakan Kurikulum, Badan Standar, Kurikulum Assesmen Pendidikan*, 2022

Bagaimanapun ketika ada kebijakan baru pasti memiliki dua sisi yang senantiasa melekat atasnya, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengkaji peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini berusaha mengetahui, memahami dan mendeskripsikan peluang dan tantangan kurikulum merdeka. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga disebut studi pustaka, karena penulis mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah dari berbagai sumber, sumber data utama adalah kebijakan kurikulum yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, sedangkan sumber sekunder adalah dari buku dan jurnal yang membahas tentang implementasi kurikulum merdeka serta didukung oleh pengalaman pribadi penulis sebagai praktisi dan pengawas di lapangan tentang pengelolaan pendidikan, diantaranya dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan identifikasi wacana dari utama artikel jurnal nasional maupun internasional, Undang-undang negara, maupun web (internet). Paling tidak tahapan yang dilakukan penulis adalah:³

1. Melacak dan mengumpulkan data-data terkait tema kajian melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah utama yang dikaji yaitu bentuk kebijakan “Kurikulum Merdeka” serta tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan seluruh Indonesia. tantangan pengembangnya dalam usaha menciptakan lulusan pendidikan yang siap bersaing di era global

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁴ Tulisan ini diharapkan bisa memberi manfaat pada pengelola lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, setelah melihat tantangan dan peluangnya ketika diterapkan.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. 2002, p. 198

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (14th ed.). Alfabeta, 2011

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Kurikulum

Sampai saat ini, terdapat banyak pengertian yang berusaha mendefinisikan istilah kurikulum. Definisi-definisi ini ternyata satu sama lain berbeda, tergantung cara pandangnya. Walaupun begitu, pengertian-pengertian tadi secara umum dapat dibagi menjadi dua: kurikulum dalam pengertian tradisional dan modern.⁵

Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada siswa di sekolah. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut kurikulum dalam pengertian ini adalah *course of study* atau *syllabus*. Dalam pengertian ini, setiap konsep kurikulum yang tidak menunjukkan bidang studi tertentu yang akan diajarkan dianggap sebagai konsep yang tidak berguna.⁶

Sedangkan pengertian modern tentang kurikulum menyebutkan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman siswa yang diberikan oleh guru di bawah naungan (program) sekolah, baik dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar.⁷ Pengertian kurikulum dalam arti modern ini dengan demikian tidak hanya mencakup pada materi pelajaran, tetapi lebih luas, mencakup juga pengalaman atau proses belajar.

Dua pengertian kurikulum di atas sampai sekarang tetap digunakan oleh para ahli kurikulum, tergantung pada pemahaman masing-masing. Dalam makalah ini, penulis cenderung menggunakan pengertian yang ke dua (pengertian modern) karena keluasan maknanya, kecuali dengan catatan khusus.

2. Sejarah Kurikulum di Indonesia

Terdapat berbagai model pembelajaran yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan, penerapan satu maupun lebih dari bermacam-macam model pembelajaran ini akan membuat transfer ilmu dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, mempraktekkan macam-macam model pembelajaran yang bervariasi bisa mengurangi kebosanan peserta didik. Dengan memahami macam-macam model pembelajaran, pendidik akan mudah dalam menyampaikan ilmu, mengingat masing-masing peserta

⁵ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1993), 9.

⁶ Daniel Tanner dan Lauren Tanner, *Curriculum Development; Theory into Practice* (New Jersey: Prentice- Hall, Inc., 1995), 151.

⁷ Nasution, *Pengembangan*, 10.

didik memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menangkap dan memahami suatu materi.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.⁸

Sebagai gambaran umum kami diskripsikan secara singkat kepada tentang kurikulum apa saja yang pernah dikembangkan dalam program pendidikan di negeri tercinta Indonesia. Salah satu konsep terpenting untuk maju adalah "melakukan perubahan", tentu yang kita harapkan adalah perubahan untuk menuju ke perbaikan dan sebuah perubahan selalu disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah selayaknya dipertimbangkan agar tumbuh kebijakan yang bijaksana. Berikut perjalanan sejarah pengembangan kurikulum di negara kita;

a. Kurun waktu 1945 sampai 1968

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda *leer plan* artinya rencana pelajaran. lebih populer ketimbang *curriculum* (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950.

Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950; Bentuknya memuat dua hal pokok: 1). Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan 2). Garis-garis besar pengajaran.

⁸ Alhamuddin, *Sejarah Kurikulum di Indonesia*, Jurnal Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah : pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

Rencana Pembelajaran Terurai 1952; Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. "Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran," (Djauzak Ahmad, Dirpendas periode 1991-1995). Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Panca wardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

b. Kurun waktu tahun 1968 sampai tahun 1999.

Kurikulum 1968; Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. "Hanya memuat mata pelajaran pokok saja," . Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum 1975; Kurikulum 1975⁹ menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Drs Mudjito; Ak; Msi (Direktur Pemb. TK dan SD

⁹ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009, 69. Dalam catatannya menyebutkan bahwa pada tahun 1947 diresmikan Rencana Pelajaran, yang kemudian menjadi Rencana Pelajaran Terurai (1952), kemudian diganti Rencana Pendidikan (1964), yang kemudian diganti sebagai kurikulum 1968. Rencana pelajaran 1947, yang pertama bersifat nasional lahir dua tahun setelah kemerdekaan, tidak lain kecuali karena meniru dengan penyesuaian rencana pelajaran sebelumnya yang masih bersifat kolonial. Pada tahap-tahap awal, dampak perkembangan politik terasa dominan

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Depdiknas). yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu," Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi: tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 1984; Kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL).

Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan.

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999; Kurikulum 1994 merukan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kur 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan

daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi.

c. Kurun waktu 1999 sampai sekarang.

Kurikulum 2004; Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).¹⁰ Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?

¹⁰ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu jiwanya desentralisasi sistem pendidikan.

Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat.

Kurikulum 2013; Dalam pelaksanaan kurikulum KTSP, muncul berbagai kritikan, saran dan masukan dari masyarakat tentang moral siswa dan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kasatmata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 (tiga) kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung serta pembentukan karakter.¹¹

Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian Nasional/UN menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik. Sehingga pada tahun 2013 pemerintah menetapkan kurikulum baru dalam rangka menyikapi kritikan dan masukan dari masyarakat maupun pakar pendidikan.

¹¹ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, <http://Kangmarttho.com>

3. Kurikulum Merdeka

Pada awal pandemi hingga tahun 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan). Penerapan Kurikulum Darurat bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran agar menjadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kemudian, pada tahun 2021 hingga 2022 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK).¹² Selanjutnya, dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022-2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Darurat sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum Merdeka sebagai opsi dilaksanakan pada sekolah yang siap melaksanakan. Tahun 2024 akan ditentukan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan.

Perubahan kurikulum yang saat ini sedang berlangsung adalah kehadiran kurikulum paradigma baru yang kemudian diberi nama secara resmi sebagai Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Kurikulum ini hadir menjadi tawaran solusi atas berbagai hasil studi tentang adanya krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menreapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wikayah dan kelompok sosialdi Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk

¹² Fieka Nurul Arifa, *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya*, Info Singkat (kajian Singkat tentang Isu Aktual dan Strategis, Vol.XI No 9, Puslit, Mei 2022

mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan adanya perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbutristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

4. Muatan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototipe ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka yang diklaim mampu mendukung pemulihan pembelajaran akibat pandemi Covid-19 yang memunculkan learning loss mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila.
- b. Fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
- c. Guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" yang meliputi: Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.¹³

Pada tahun 2020, USBN akan digantikan dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan sendiri oleh sekolah. Ujian yang diadakan untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk tes lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan yang termasuk di dalamnya tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Dengan demikian guru dan sekolah memiliki

¹³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Riset, *Buku Saku Merdeka Belajar*, <http://repositori.kemdikbud.go.id/2002>

kemerdekaan untuk menilai hasil belajar siswanya. Anggaran yang sedianya digunakan untuk USBN dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ujian Nasional (UN) terakhir kali diadakan pada tahun 2020. Yang kemudian pada tahun 2021 diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter. AKM ditekankan pada kemampuan Literasi dan numerasi siswa yang mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Pelaksanaan AKM dan Survey Karakter dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah misalnya kelas 4, 8, dan 11. Hal ini bertujuan untuk mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan bukan untuk basis seleksi siswa pada jenjang berikutnya.

Arah kebijakan baru yang berkaitan dengan kurikulum mengatakan bahwa guru dapat bebas memilih, membuat, dan mengembangkan format RPP. RPP wajib memuat 3 komponen yaitu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sedangkan komponen lainnya hanya bersifat melengkapi saja.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud akan tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Mendikbud kemudian menambahkan bahwa setiap daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Sehingga kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, maka ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka, diantaranya:¹⁴

- a. Lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya.
- b. Tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
- c. Bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik.

¹⁴ Nita Oktiva, *Dampak Positif dan Negatif Pergantian Kurikulum Baru*, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs>
Ta'dibi : Jurnal Prodi Manajemen Pendidikan Islam
Volume X Nomor 2, Maret – Agustus 2022

- d. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
- e. Lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.

5. Istilah Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka

Di dalam kurikulum ini guru dapat memilih dan menentukan format, materi esensial, cara dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada siswa. Guru diharapkan mampu menjadi penggerak yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi siswanya. Karena setiap siswa memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan.

Merdeka belajar berarti guru maupun siswa memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar dengan mandiri dan kreatif. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan berjalan lebih fleksibel dan menyenangkan. Guru-guru dituntut untuk dapat mendidik siswanya sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka.

Sehingga guru-guru harus mampu membuat serta mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan efektif bagi siswa. Dengan begitu siswa mampu mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Salah satu model pembelajaran yang dipakaidi masa pandemi ini adalah model pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mau tidak mau guru zaman now harus mampu menggunakan TIK untuk mendidik siswa di era pandemi dan digital ini.

Jadi TIK disini sebagai perangkat untuk memfasilitasi perkembangan pembelajaran siswa. TIK bukan sebagai mata pelajaran akan tetapi sebagai perangkat yang terintegrasi dalam pembelajaran. Berikut salah satu model pembelajaran inovatif memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Beberapa Paradigma Baru dalam Kurikulum Merdeka

Jika kita komparasikan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 2013, maka dalam kurikulum merdeka terdapat beberapa paradigma baru, diantaranya:

- a. Kurikulum Merdeka, bukan kewajiban tetapi opsional

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Perlu diketahui untuk paradigma pertama untuk Kurikulum Merdeka ini, di mana status dari adanya Kurikulum Merdeka ini bukan kewajiban bagi semua sekolah menerapkannya. Sebab Kurikulum Merdeka ini sifatnya adalah opsional, untuk lembaga pendidikan yang ingin menggunakan Kurikulum Merdeka ini. Jika sekolah ingin menggunakan Kurikulum Merdeka ini, terdapat beberapa tahapan untuk menggunakan Kurikulum Merdeka yakni:

Pilihan pertama, pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua

Pilihan kedua, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana

Pilihan ketiga, pelatihan dan penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang

Hal itu diperuntukkan agar Kurikulum Merdeka ini dilakukan berdasarkan kesiapan dan kebutuhan sekolah.¹⁵

b. Pengaturan jam belajar

Untuk Kurikulum 2013 dalam pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu, sehingga tidak cukup memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran. Karena hal tersebut, kegiatan pembelajaran dapat berdampak menjadi pada jam mengajar guru yang padat.

Sedangkan untuk Kurikulum Merdeka, menetapkan jam pelajaran per tahun. Hal itu disebabkan, agar sekolah bisa melakukan inovasi dalam menyusun Kurikulum pembelajarannya.

c. Pendekatan Pembelajaran

Pada Kurikulum 2013, seperti yang guru ketahui yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran tematik untuk jenjang Paud dan SD. Serta berbasis mata pelajaran untuk jenjang SMP hingga SMA atau SMK. Sedangkan pada Kurikulum Merdeka, akan lebih fleksibel. Sehingga guru dapat melakukan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, inkuri, atau kolaborasi antar mata pelajaran.

d. Struktur Kurikulum

Pada Kurikulum Merdeka untuk paradigma baru dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama kegiatan intrakurikulum yang bisa dilakukan dengan tatap muka. Kedua, yaitu kegiatan proyek ini dilakukan untuk mencapai profik pelajar Pancasila.

¹⁵ Kemendikbud, Buku Saku; *tanya jawab Kurikulum Merdeka*, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Untuk kegiatan proyek ini terdapat untuk setiap jenjang pendidikan dari Paud hingga SMA.

e. Mata Pelajaran IPAS

Paradigma lain pada Kurikulum Merdeka yaitu terdapat pada mata pelajaran IPA dan IPS pada sekolah dasar kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6.

Pada Kurikulum Merdeka, dua mata pelajaran tersebut akan dilakukan secara bersama, dengan nama mata pelajaran IPAS.

f. Mata Pelajaran TIK

Selanjutnya untuk paradigma di Kurikulum Merdeka yaitu ada di mata pelajaran TIK. Di mana pada Kurikulum Merdeka ini akan terdapat mata pelajaran TIK.

Setelah sebelumnya di Kurikulum TIK, mata pelajaran ini sempat dihilangkan, maka di Kurikulum Merdeka ini akan kembali diajarkan di jenjang SMP hingga SMK.

g. Kurikulum berbasis kompetensi

Antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka, sama-sama berbasis kompetensi. Perbedaannya hanya ketika di Kurikulum 2013, guru mengenal istilah KI dan KD.

Maka pada Kurikulum Merdeka, KI dan KD dihilangkan dan digabung menjadi CP atau capaian pembelajaran.

7. Implementasi Kurikulum Merdeka di Setiap Jenjang

Mulai tahun ajaran 2022/2023, penerapan Kurikulum Merdeka ini tidak hanya akan dikhususkan pada satuan pendidikan tingkat SMA/ sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa mulai digunakan pada tingkat lainnya, seperti TK, SD, SMP, hingga Perguruan Tinggi (PT). Tentunya, penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang.

a. Di Tingkat SD

Sebelum membahas perbedaan kurikulum ini di tingkat SD, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Merdeka Belajar di tingkat PAUD/TK maknanya adalah merdeka untuk bermain.

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Dengan begitu, penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD/TK adalah dengan mengajak anak bermain sambil belajar, tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Sementara itu, di tingkat SD, ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran (mapel) pada penerapan Kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah penggabungan mapel IPA dan IPS menjadi satu (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial), serta menjadikan bahasa Inggris yang sebelumnya merupakan mapel muatan lokal (mulok) sebagai mapel pilihan.

b. Di Tingkat SMP

Hampir sama dengan tingkat SD, Panduan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat SMP juga terdapat perubahan status beberapa mapel. Misalnya, mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi mapel wajib. Pada kurikulum sebelumnya, mapel ini hanya sebagai pilihan. Maka, kelak di semua jenjang SMP, wajib memiliki mapel Informatika.

c. Di Tingkat SMA

Untuk tingkat SMA, seperti yang telah disinggung di awal, penggunaan Kurikulum Merdeka memungkinkan para siswa tidak akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan, seperti IPA, IPS, maupun Bahasa. Sementara itu, di tingkat SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 70 persen mapel kejuruan dan 30 persen mapel umum. Selain itu, pada akhir masa pendidikannya kelak, para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah sebagaimana para mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Hal ini demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analitis.

d. Di Tingkat PT

Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi terwujud dalam Program Kampus Merdeka. Pelaksanaannya pun memiliki beberapa perbedaan dengan penerapan kurikulum sebelumnya.

Dalam Program Kampus Merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar program studi yang ditempuhnya. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti praktik kerja (magang), pertukaran mahasiswa,

penelitian, proyek independen, wirausaha, menjadi asisten pengajar, juga Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk membangun desa.¹⁶

8. Potensi Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka tidak jauh berbeda dengan dua kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013 (K-13) yang semuanya memberikan porsi yang besar untuk satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang ada di lembaga pendidikannya masing-masing. Sehingga tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplemantasikan kurikulum merdeka tidak jauh berbeda dengan tantangan ketika kurikulum KTSP dan K-13 ditetapkan.¹⁷

Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan mindset para pendidik. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, menjelaskan kurikulum yang diterapkan Indonesia pada era 1970-an hingga kini mengadopsi sistem Jerman. Sementara negara tersebut sudah berubah pesat namun Indonesia masih menggunakan pola yang sama.

Hal ini menjadi tantangan bagi para pendidik. Dalam Kurikulum Merdeka, terdapat perubahan fungsi pendidik yang semula mengajar dengan pendekatan yang diseragamkan atau satu ukuran untuk semua (*one size fits all*), menjadi seseorang yang mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dalam hal ini, guru harus menjadi mentor, fasilitator, atau coach dalam kegiatan belajar yang berbasis proyek (*project based learning*) secara aktif. Untuk mengubah mindset tenaga pendidik, Kemendikbudristek melakukan pelatihan berbasis proyek dan kompetensi pedagogik untuk guru dan dosen). M. Fatkoer Rohman, salah satu kepala sekolah SMA yang sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan kedua Tahun Ajaran 2022/2023 menjelaskan perlunya penguatan pemahaman pada pihak guru/sekolah bahwa kurikulum bukan sebatas materi/ mata pelajaran agar IKM berdampak.

Pada pergantian kurikulum selama ini, guru tetap saja mengajar dengan cara yang sama (ceramah) dan pembelajaran tidak berpusat pada siswa sehingga perubahan

¹⁶ Sahid Agustian Hudjimarstu dkk, *Peluang dan Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Teknik dan Sains UIKA Bogor*, Jurnal Teknologi Pendidikan Educate, Vol.7 No.1 Januari 2022

¹⁷ Kemendikbud, Buku Saku; *tanya jawab Kurikulum Merdeka*, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>

kurikulum tidak memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan pendidikan.¹⁸ Sebenarnya Kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013.

Penggunaan istilah-istilah baru pada Kurikulum Merdeka sebenarnya merangkum apa yang ada dalam kurikulum sebelumnya tetapi dengan istilah berbeda. Tantangannya adalah ketika guru mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran. Guru diberi kemerdekaan, tetapi dari sisi kemampuan masih banyak guru yang belum siap. Kenyataan yang terjadi, bahkan masih banyak guru yang belum mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik.¹⁹

Oleh karena itu, penguatan untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah menjadi penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga perlu memberikan pedoman pelaksanaan kurikulum yang berisi kerangka kurikulum untuk diacu oleh sekolah, agar keleluasaan sekolah dalam IKM dapat terpantau dan terpetakan kualitasnya.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah kesiapan siswa dalam IKM, terutama berkaitan dengan keleluasaan siswa untuk memilih sendiri apa yang akan mereka pelajari. Hal ini perlu menjadi perhatian agar siswa benar-benar memilih apa yang akan dipelajari berdasarkan bakat dan minatnya, bukan sekedar ikut-ikutan pilihan temannya atau bahkan karena tekanan. baik dari guru maupun orang tua siswa.

Di sinilah penguatan peran dan kerja sama pendidik dan orang tua siswa sangat penting dalam mendorong dan mengarahkan siswa belajar sesuai dengan minat dan potensinya untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan bermakna. Perubahan kurikulum maupun penerapan kurikulum baru dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah kebutuhan ketika kurikulum sebelumnya sudah tidak relevan atau ketika ada kebutuhan mendesak untuk percepatan pemulihan pendidikan.

Namun, perubahan kurikulum yang kurang matang, tergesa, dan terlalu cepat berganti akan sangat memberatkan satuan pendidikan sebagai pelaksana. Terutama bagi sekolah yang masih memerlukan banyak bantuan dan berada di daerah tertinggal. Tanpa persiapan yang matang, bukan hasil pendidikan maksimal yang dicapai tetapi hanya hasil percobaan semata, dan pelaksana pendidikan justru direpotkan dengan tuntutan penyesuaian secara terus-menerus. Hal ini karena kurikulum yang satu belum diimplementasikan dengan baik, sudah diganti dengan kurikulum baru.

¹⁸ Fieka Nurul Arifa, *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya*, Info Singkat (kajian Singkat tentang Isu Aktual dan Strategis, Vol.XI No 9, Puslit, Mei 2022

¹⁹ YouTube Vox Populi Institute Indonesia, 8 Mei 2022

Tantangan dan kritik dari pihak-pihak terkait perlu menjadi pertimbangan bagi Kemendikbudristek dalam IKM. Meskipun belum dilaksanakan secara serentak, tetapi IKM secara mandiri sudah akan dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek juga perlu memastikan kesiapan IKM.²⁰

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. Berkaitan dengan payung hukum. Perlu dipastikan bahwa IKM dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas.
- b. Dari sisi SDM. Perlu persamaan pemahaman antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, serta pihak terkait mengenai Kurikulum Merdeka secara jelas dan rinci. Perlu adanya panduan agar IKM dilaksanakan dengan keleluasaan bagi sekolah tetapi tetap bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Guru dan kepala sekolah juga perlu mendapat pelatihan untuk memahami perannya dalam kegiatan belajar serta mengembangkan kompetensi dan keterampilan dalam IKM.
- c. Dari sisi sarana dan prasarana. IKM tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, terutama karena menggunakan platform digital yakni Platform Merdeka Mengajar. Dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat diakses dengan meminimalisasi hambatan. Keempat, dari sisi anggaran. Pendanaan untuk IKM perlu dianggarkan dengan tepat agar tidak membebani sekolah. Mengingat jumlah BOS yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa, maka penggunaan BOS untuk pembelian buku-buku dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan IKM akan sangat memengaruhi dana operasional sekolah, terutama bagi sekolah yang bukan pelaksana Sekolah Penggerak.

9. Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka

Melihat tahapan serta dasar pijakan menteri pendidikan dalam menetapkan kurikulum Merdeka sebagai tawaran solusi atas krisis pembelajaran yang dialami oleh lembaga pendidikan yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pembelajaran daring selama pandemi covid-19, di mana pemerintah tidak serta merta memberlakukan kurikulum merdeka, tapi dengan opsi-opsi yang disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan.

²⁰ Kemendikbud, Buku Saku; *tanya jawab Kurikulum Merdeka*, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/>

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

Pengembangan kurikulum pada suatu sekolah menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari sekolah itu sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Sehingga dalam pembagian kewajiban, peran dan fungsi dalam penyusunan kurikulum, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya dalam menerapkan kurikulum menjadi kewajiban sekolah dan otonomi bagi guru.

Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberi opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan.

Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada tahun 2024, sudah barang tentu kurikulum merdeka sudah melalui kajian dan perbaikan selama tiga tahun di berbagai sekolah / madrasah dan daerah. Sehingga pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah / madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah / madrasah lain. Dengan adanya pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk belajar.

Selain jeda waktu yang cukup lama dalam menyiapkan implementasi kurikulum tersebut, juga berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kemetrian dan Dinas pendidikan baik propinsi maupun kabupaten, seperti seminar, pelatihan, pembinaan pengelola sekolah, pelatihan guru, penerbitan buku-buku panduan maupun buku saku baik yang berbentuk cetakan maupun file dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan agar kurikulum merdeka mudah diaplikasikan oleh pengelola lembaga pendidikan.

Beberapa pengelola lembaga pendidikanpun berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu sekolah yang siap mengimplementasikan kurikulum merdeka dan mengutus delegasi ataupun mengundang para pakar untuk memebrikan pelatihan teknis dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut di sekolah atau madarasah mereka.

Dengan persiapan dan pengkondisian sedemikian rupa, maka sangat memungkinkan peluang diaplikasikannya kurikulum ini secara serentak pada tahun 2024 sangat besar.

D. KESIMPULAN

Melihat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti kesiapan kompetensi, keterampilan, mindset pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan harus menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan penataan dan membuat kebijakan-kebijakan yang dirasa mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ke depan.

Kita juga harus mengapresiasi langkah-langkah dan tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mengedukasi dan menyiapkan instrumen-instrumen dalam memudahkan implementasi kurikulum merdeka yang rencananya baru akan ditetapkan untuk diimplementasikan secara resmi pada tahun 2024 mendatang. Dengan rentang waktu yang cukup lama dan kesempatan melakukan koreksi dan perbaikan yang cukup akan menjadikan peluang implementasi kurikulum merdeka semakin besar. Sehingga harapan utama dalam menetapkan kurikulum merdeka dapat diwujudkan, karena Peningkatan kualitas hasil belajar siswa (karakter, literacy dan numeracy) dalam kebijakan merdeka belajar dapat tercapai hanya jika terjadi perubahan dan inovasi di level sekolah, Sekolah menjadi aktor utama dalam upaya untuk berubah dan berinovasi, namun demikian dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta warga sekolah akan semakin memudahkan pengelola sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut.

Daftar Pustaka

- Alhamuddin, *Sejarah Kurikulum di Indonesia*, Jurnal Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014
- Agustian, Sahid, Hudjimarstu dkk, *Peluang dan Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Teknik dan Sains UIKA Bogor*, Jurnal Teknologi Pendidikan Educate, Vol.7 No.1 Januari 2022
- Anggraeni, Yogi, *Regulasi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka*, <https://www.yukdaring.my.id/2022>
- Kemendikbud, Buku Saku; *tanya jawab Kurikulum Merdeka*, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi, *Kebijakan Kurikulum*, Badan Standar, Kurikulum Assesmen Pendidikan, 2022

Kurikulum Merdeka, Peluang Dan Tantangan Implementasi

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, <http://Kangmarttho.com>
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, *Tekhnologi dan Riset*, 2020, Buku Saku Merdeka Belajar, <http://repositori.kemdikbud.go.id>
- Nurul, Fieka, Arifa, *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya*, Info Singkat (kajian Singkat tentang Isu Aktual dan Strategis, Vol.XI No 9, Puslit, Mei 2022
- Nasution, S, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1993
- Oktiva, Nita, *Dampak Positif dan Negatif Pergantian Kurikulum Baru*, <https://akupintar.id/info-pintar>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (14th ed.). Alfabeta. 2011
- Surakhmad, Winarno, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009
- Tanner, Daniel dan Lauren Tanner, *Curriculum Development; Theory into Practice*, New Jersey: Prentice- Hall, Inc., 1995
- Wina Sanjaya. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005